

Globalisasi dan Rekonstruksi Identitas: Telaah Filosofis Restorasi Meiji untuk Revitalisasi Budaya Indonesia

Mohamad Khusnial Muhtar¹, Fitri Ariska², Thoriq Baihaqi Firdaus³, Sartini Sartini⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Received: 17-12-2024; Revised: 11-03-2025; Accepted: 26-03-2025; Published: 26-03-2025

Abstract

Globalization has had a profound impact worldwide, including in Indonesia, particularly concerning national cultural identity. In this context, Japan serves as an exemplary case of a nation that has successfully preserved its cultural identity. Through the Meiji Restoration, Japan established a robust foundation that enabled it to adapt to global changes while reinforcing its cultural identity, which has remained intact despite globalization. This article aims to explore how Japan through the Meiji Restoration could be successful. The article also explains how Japan's strategy can be emulated as a basis for reconstructing Indonesia's cultural identity and revitalizing Indonesian culture in the modern era. This study employs a library research method with a philosophical approach. Data were analyzed through a literature review on Japanese cultural transformation and the challenges of Indonesia's cultural identity in the globalization era. The findings reveal that: (1) Japan's success in the Meiji Restoration was achieved through social transformation, political reform with centralized governance, and cultural diplomacy that integrated traditional values with modernization; (2) Indonesia can emulate Japan's strategy by reforming education to instill national values, adopting flexible cultural preservation strategies, and fostering collaboration between the government, society, and cultural communities for sustainable cultural policies. Indonesia's cultural identity must be viewed as a reflection of the nation's character and mentality, not merely its outward symbols or traditions. This article recommends further research on education models that instill cultural character from an early age, technological strategies for promoting culture, and the integration of traditional values into the creative economy.

Keywords: *globalization; identity reconstruction; Indonesian culture; Meiji restoration*

1. Pendahuluan

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi mengaburkan batas negara dan mempersempit jarak budaya, memungkinkan pertukaran ide dan nilai-nilai berlangsung dengan cepat dan masif. Namun, di balik kemajuan ini, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar dalam mempertahankan identitas budaya lokal. Bagi Indonesia, yang kaya akan keanekaragaman budaya, derasnya arus ini menjadi ujian berat, terutama dalam hal menjaga karakter budaya di tengah persaingan global (Bangu & Kasim, 2024).

Tantangan ini terlihat dalam perubahan berbagai aspek budaya, terutama di kalangan generasi muda. Sebagai contoh dalam cara mereka berpenampilan, pakaian tradisional seperti kebaya dan batik yang mulanya merupakan simbol kebanggaan nasional, sering tersisih oleh tren pakaian Barat seperti jas, kemeja, kaos grafis, dan jeans, yang dianggap lebih “biasa saja”,

¹ mohamadkhusnialmuhtar@mail.ugm.ac.id
Telp. +62 877-6903-7736

“normal”, atau bahkan “keren” dan “trendi” (Pratamartatama et al., 2024). Di bidang hiburan dan kesenian, tren K-Pop dan K-Drama dari Korea Selatan sangat populer. Kepopulerannya sampai mendorong mereka untuk mengidentifikasi diri dengan gaya hidup ala Korea, mulai dari mode busana, tata rias, makanan, hingga perilaku sehari-hari (Alam et al., 2023). Selain itu, pengaruh budaya Jepang melalui *anime* dan *manga* juga kuat; bahkan banyak anak muda yang menjadi bagian dari komunitas *cosplay* dan *wibu*—subkultur global yang menggemari budaya Jepang, mulai dari *anime* hingga seni tradisional Jepang (Pristianti, 2024). Tren ini menunjukkan bagaimana budaya asing telah menyusup ke dalam relung kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa generasi penerus tongkat estafet budaya Indonesia ini seakan mengalami krisis identitas, kehilangan jati diri bangsa, lantaran kuatnya kecenderungan untuk meniru dan mengidentifikasi diri dengan budaya asing, yang mana bukan berasal dari tanah air mereka sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi demikian, muncul sejumlah pertanyaan filosofis tentang identitas budaya. Pertama, ketika kontaminasi budaya menjadi sesuatu yang niscaya, apakah identitas budaya dapat dipertahankan di tengah arus globalisasi yang masif, ataukah identitas itu akan tergerus oleh budaya global yang lebih dominan? Kemudian, dapatkah identitas budaya tetap kokoh meskipun terus bertransformasi di bawah pengaruh globalisasi, ataukah perubahan ini mengharuskan adanya rekonstruksi identitas budaya yang lebih fleksibel? Dalam konteks ini, terlepas dari pengaruhnya terhadap generasi muda Indonesia, Jepang adalah contoh menarik dari negara yang pernah mengalami tantangan serupa.

Jepang, negara yang terkenal dengan idealismenya dalam menjunjung nilai, prinsip, dan tradisi Samurai pada masa lampau pernah menghadapi kegamangan identitas di tengah modernisasi dunia yang pesat. Saat itu, negara ini berada dalam persimpangan antara mempertahankan segenap elemen budaya beserta nilai-nilai tradisionalnya atau mengadopsi budaya asing yang dianggap lebih maju. Sebagaimana dijelaskan oleh Teranishi (2020), melalui Restorasi Meiji, Jepang berhasil keluar dari kegamangan identitas dengan mengadopsi elemen-elemen modern Barat sambil menjaga nilai-nilai tradisional yang terinternalisasi. Restorasi Meiji membawa perubahan besar dalam hal teknologi dan ekonomi, serta berhasil menciptakan identitas Jepang yang baru. Identitas Jepang yang lahir dari Restorasi Meiji memiliki nafas budaya yang tetap kuat dan khas, yang secara faktual tetap hidup dan relevan hingga sekarang.

Sehubungan dengan itu, muncul pertanyaan utama dalam penelitian ini: Bagaimana sejarah Restorasi Meiji dalam merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budaya Jepang? Bagaimana keadaan dan karakteristik manusia dan kebudayaan Indonesia hari ini di tengah terpaan arus globalisasi? Apakah pola Restorasi Meiji juga dapat diterapkan untuk merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budaya Indonesia dalam bentuk transformasi budaya? Jika iya, kenapa demikian dan bagaimanakah strategi yang kiranya bisa menjadi langkah untuk Indonesia ke depan?

Dalam literatur yang ada, berbagai studi telah mengkaji aspek penting dari Restorasi Meiji dan perannya dalam membentuk Jepang modern serta pengaruhnya terhadap negara-negara di Asia. Artikel seperti yang ditulis Rustamana et al. (2023) menunjukkan bagaimana restorasi Meiji menjadikan Jepang berhasil mereformasi pemerintahannya, mengembangkan militer, dan membangun sektor industri untuk menjadi kekuatan industri Asia yang disegani, dengan mengintegrasikan nilai tradisional melalui konsep *Wakon Yosai* (“semangat Jepang, pengetahuan Barat”). Studi ini menggarisbawahi bahwa Restorasi Meiji bukan sekadar peniruan Barat, tetapi juga penegasan identitas nasional yang kuat dan adaptif. Selain itu, kajian dari Anita & Lado (2024) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa upaya Jepang mempertahankan elemen budaya tradisional dalam modernisasi menjadi kunci keberhasilan transformasi budaya yang tetap berakar.

Di sisi lain, penelitian-penelitian tentang identitas manusia dan kebudayaan Indonesia juga sudah cukup banyak. Artikel penelitian dari Pangesti et al. (2024) ditulis dengan lebih menyoroti tantangan pelestarian identitas budaya lokal di tengah arus globalisasi yang masif. Sementara dari Mutmainah & Dewi (2021) lebih mengaitkan pada pengaruh budaya asing melalui media sosial dan *pop culture* yang sering kali mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih mengidentifikasi diri dengan budaya global. Adapun penelitian yang mengaitkan hubungan antara Jepang dan Indonesia, lebih eksplisit pada kemungkinan penerapan pola rekonstruksi identitas yang diadopsi Jepang pada masa Restorasi Meiji ke dalam konteks Indonesia, belum mendapat perhatian khusus dari kalangan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan perspektif baru terkait adaptasi strategi rekonstruksi budaya Jepang untuk mendukung upaya Indonesia dalam membangun identitas budaya yang kuat, adaptif, dan tetap relevan di era global. Mengingat, berdasarkan penelitian Widiastuti (2013), dapat dipahami bahwa Indonesia memiliki potensi serupa, yakni berupa kekuatan keragaman budaya yang unik dan peluang untuk menjadikannya sebagai alat pemersatu bangsa serta daya tarik internasional dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi kemungkinan penerapan pendekatan yang ditempuh Jepang dalam mendukung rekonstruksi identitas dan mempopulerkan budaya Indonesia di tengah globalisasi. Dengan menggali pengalaman Jepang, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang memperkaya pemahaman dalam menjaga dan memperkuat identitas budaya di era globalisasi. Lebih jauh, artikel ini menawarkan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan budaya yang strategis, dengan fokus pada penguatan budaya lokal dan peningkatan apresiasi generasi muda terhadap warisan tradisional. Melalui pendekatan yang komprehensif dan aplikatif, artikel ini memperluas kajian budaya dan memberikan wawasan praktis bagi pemerintah, komunitas budaya, dan akademisi dalam merancang langkah konkret untuk mempertahankan identitas budaya yang adaptif, kuat, dan relevan di kancah global.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi pustaka, yang bertumpu pada pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai literatur sebagai sumber utama (Zed, 2008). Metode ini dipilih karena relevansinya dengan tujuan penelitian yang berfokus pada eksplorasi konseptual dan teoritis terkait identitas budaya serta upaya rekonstruksinya di tengah tantangan globalisasi. Proses penelitian dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah meliputi: pengumpulan data literatur, penyaringan dan seleksi literatur, analisis literatur menggunakan pendekatan filosofis, serta penyimpulan dan rekomendasi (Zed, 2008). Berikut uraian lebih lanjut.

Langkah pertama adalah pengumpulan data literatur. Dalam tahap ini, peneliti mengakses berbagai sumber terpercaya, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dan aneka dokumen akademik yang relevan dengan topik pembahasan. Fokus literatur meliputi kajian tentang sejarah Restorasi Meiji di Jepang, tantangan identitas budaya di era globalisasi, dan relevansi strategi budaya Jepang dalam konteks Indonesia. Sumber-sumber ini diperoleh melalui pencarian pada laman digital seperti Google Scholar, Library Genesis, dan Springer, serta pada koleksi cetak pada perpustakaan terdekat. Pada tahap ini, peneliti mengunduh dan mencatat semua referensi yang potensial, baik yang bersifat historis, teoretis, maupun kontekstual.

Setelah data terkumpul, dilakukan penyaringan dan seleksi literatur untuk memastikan relevansi, validitas, dan aktualitas sumber yang digunakan. Literatur yang dipilih dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: (1) kajian historis dan konseptual terkait

Restorasi Meiji, (2) literatur yang membahas tantangan identitas budaya Indonesia, dan (3) kajian yang menyoroti hubungan budaya antara Jepang dan Indonesia. Literatur yang redundan, kurang kredibel, atau tidak relevan dieliminasi untuk menjaga fokus dan kualitas analisis. Literatur-literatur paling mutakhir, dalam jangka lima tahun terakhir, adalah yang akan dipilih dan lebih diutamakan demi aktualitas sumber. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa penelitian didasarkan pada sumber yang valid dan terpercaya, serta pembahasannya efisien dan aktual—tidak meluas dan mengulang kajian yang pernah ada.

Tahap berikutnya adalah analisis literatur menggunakan pendekatan filosofis. Dalam tahap ini, analisis dilakukan dengan menelaah, mengidentifikasi, membandingkan dan menyintesis temuan-temuan dari berbagai literatur yang terpilih secara kritis dan komprehensif (Bakker & Zubair, 2020). Peneliti terlebih dahulu menelaah konsep-konsep dasar seperti identitas budaya, globalisasi, dan arah kebudayaan dengan fokus pada bagaimana Jepang, melalui Restorasi Meiji, berhasil merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budayanya. Kemudian, pola-pola dan prinsip-prinsip yang mendasari keberhasilan Jepang diidentifikasi, termasuk elemen-elemen seperti integrasi nilai tradisional dan modern, peran pendidikan, serta strategi sentralisasi kekuasaan. Selanjutnya, peneliti membandingkan antara konteks sosial, budaya, dan politik Jepang pada masa Restorasi Meiji dengan kondisi Indonesia saat ini untuk mengevaluasi relevansi dan potensi adaptasi strategi dalam menjaga identitas budaya di era globalisasi. Hasil dari perbandingan tersebut disintesis guna mengungkap hubungan antara strategi budaya Jepang dengan tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia, menghasilkan pemahaman yang tidak hanya deskriptif (bagaimana strategi diterapkan), tetapi juga normatif (kesesuaiannya dengan nilai dan konteks Indonesia).

Tahap terakhir adalah penyimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan temuan-temuan analisis, penelitian ini menyimpulkan apa saja langkah-langkah strategis yang dapat diadopsi untuk mendukung rekonstruksi identitas budaya Indonesia. Kesimpulan ini diikuti dengan rekomendasi praktis, utamanya ditujukan kepada pemerintah, komunitas budaya, dan akademisi sebagai panduan dalam merancang kebijakan dan strategi budaya yang adaptif, kuat, dan relevan di era global. Dengan keseluruhan langkah-langkah ini, penelitian ini menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, memberikan kontribusi nyata dalam memperkaya kajian budaya dan menawarkan solusi praktis untuk tantangan kebudayaan Indonesia di tengah arus globalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penelitian ini dibahas melalui tiga subbab utama. Subbab pertama membahas bagaimana Jepang melalui Restorasi Meiji berhasil merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budayanya. Subbab kedua mengeksplorasi kondisi dan karakteristik manusia dan dinamika Indonesia di era globalisasi seperti apa. Subbab ketiga mengevaluasi relevansi dan potensi adaptasi strategi budaya Jepang untuk membantu Indonesia dalam merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budayanya.

3.1 Restorasi Meiji dalam Rekonstruksi Identitas dan Revitalisasi Budaya Jepang

Restorasi Meiji adalah periode transformasi besar di Jepang yang dimulai pada tahun 1868, ketika kekuasaan politik dikembalikan dari pemerintahan shogun kepada Kaisar Meiji. Periode ini mengakhiri sistem feodal yang telah berlangsung selama berabad-abad di bawah Keshogunan Tokugawa dan menjadi titik awal modernisasi Jepang. Restorasi ini dipicu oleh tekanan besar dari kekuatan asing, terutama setelah kedatangan Komodor Matthew Calbraith Perry (1794-1858), seorang perwira angkatan laut dari Amerika Serikat yang tiba di Teluk Edo

pada tahun 1853 dengan membawa ultimatum yang mendesak Jepang untuk membuka pelabuhannya. Pasukan Perry hadir dengan ancaman militer bersenjata modern, memaksa Jepang menandatangani perjanjian-perjanjian tidak seimbang dengan negara-negara Barat (Anita & Lado, 2024). Tekanan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan elite politik terhadap rezim pada waktu itu, sekaligus memperlihatkan kelemahan sistem feodal yang dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa.

Tekanan eksternal ini memperlihatkan kelemahan sistem feodal yang dipimpin oleh Keshogunan Tokugawa di bawah Shogun Tokugawa Yoshinobu (1867–1868). Pemerintah Tokugawa dianggap tidak mampu melindungi kepentingan nasional, sehingga muncul gerakan reformasi yang menuntut perubahan besar. Pada tahun 1868, pemerintahan Tokugawa akhirnya digulingkan melalui serangkaian konflik yang berpuncak pada Perang Boshin (1868–1869), dan kekuasaan dikembalikan kepada Kaisar Meiji. Kekuasaan Jepang di bawah tangan Meiji menandai dimulainya restrukturisasi menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan di Jepang (Hellyer & Fuess, 2020). Langkah ini mengakhiri sistem feodal dan membuka jalan baru bagi Jepang untuk mengejar modernisasi yang dapat mengimbangi bahkan menyaingi kekuatan negara-negara Barat. Adapun bagaimana era tersebut membawa Jepang sebagaimana sekarang, dengan sebuah identitas kokoh dan berpengaruh di panggung internasional; transformasi sosial, reformasi politik, dan diplomasi kebudayaan menjadi tiga hal utama yang digalakkan.

Pertama, transformasi sosial. Restorasi Meiji membawa perubahan besar dalam struktur sosial Jepang. Salah satu langkah awal yang diambil adalah penghapusan sistem feodal. Sistem kasta yang menempatkan samurai sebagai kelas sosial tertinggi dihapuskan, bersama dengan hak istimewa yang mereka miliki (Hellyer & Fuess, 2020). Langkah ini menghilangkan hierarki sosial yang kaku, dan membuka peluang bagi masyarakat umum untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Transformasi ini menjadi dasar bagi pembentukan masyarakat yang lebih egaliter, di mana kesempatan diberikan kepada semua individu berdasarkan kemampuan, bukan asal-usul sosial mereka.

Maka dari itu, meritokrasi menjadi pilar utama dalam struktur sosial baru ini. Kemampuan individu dan kontribusi mereka terhadap pembangunan negara mulai menjadi ukuran keberhasilan. Pemerintah Meiji mendorong sistem ini dengan membangun institusi pendidikan yang dapat mengembangkan keterampilan dan potensi rakyatnya. Pada tahun 1872, sistem pendidikan wajib diperkenalkan dengan nama *Gakusei* yang menjadikan Jepang salah satu negara pertama di Asia yang mengadopsi kebijakan pendidikan nasional. Sistem ini bertujuan menciptakan masyarakat yang terdidik dan siap bersaing di kancah global, sebuah langkah yang revolusioner pada masanya (Duke, 2009).

Dalam kurikulum pendidikan *Gakusei*, ilmu pengetahuan dan teknologi modern diajarkan secara masif kepada masyarakat Jepang. Ini dibarengi dengan Pemerintah Jepang yang juga mendirikan berbagai lembaga pendidikan tinggi, termasuk Universitas Tokyo pada tahun 1877, yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Institusi ini dirancang untuk menghasilkan tenaga kerja profesional yang dibutuhkan dalam era industrialisasi yang sedang berlangsung (Duke, 2009). Meskipun kemudian, sistem ini menghadapi banyak tantangan, terutama dari masyarakat daerah yang menganggap kurikulum dan pendekatan Barat-nya yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kondisi lokal (Rustam, 2003).

Oleh karena itu, sistem *Gakusei* tersebut kemudian disempurnakan melalui kebijakan *Kyoikurei* tahun 1879 yang memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan mereka, walau pengawasan dari pusat tetap diberlakukan. Perubahan ini juga diiringi dengan penekanan lebih besar terhadap pendidikan moral yang berlandaskan nilai-nilai Konfusianisme. Ajaran moral yang diutamakan meliputi kesetiaan kepada negara,

keharmonisan sosial, kerja keras, dan penghormatan kepada otoritas, yang diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini (Aso & Amano, 1972). Proses evaluasi dan revisi yang berkesinambungan terhadap sistem yang ada mencerminkan komitmen pemerintah Jepang dalam membangun masyarakat yang terdidik dan kompetitif di era modern. Hal ini diperkuat dengan pemerintah Jepang yang pada tahun 1890 mengeluarkan Dekrit Pendidikan *Kyoiku Chokugo*.

Dekrit *Kyoiku Chokugo* ini, di satu sisi, menekankan pentingnya loyalitas kepada negara dan Kaisar, dan di sisi lain, menegaskan penguatan ajaran moral dalam sistem pendidikan sebagai fondasi utama pembentukan karakter bangsa. Kebijakan ini menjadi landasan untuk membentuk generasi Jepang yang menguasai pengetahuan dan teknologi modern dengan tetap berpegang pada nilai-nilai moral yang dianggap esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Konfusianis dan prinsip-prinsip Bushido sebagai pralambang Samurai seperti kesetiaan, kehormatan, etos kerja keras, disiplin, dan pengendalian diri diajarkan dan dilatihkan secara terstruktur melalui berbagai lembaga pendidikan yang berkembang pada masa itu (Aso & Amano, 1972). Perpaduan antara penguasaan ilmu modern dan penanaman nilai-nilai tradisional ini menjadi elemen penting dalam membangun kekuatan nasional Jepang yang berkarakter kuat. Reformasi pendidikan ini mendorong keberhasilan Jepang di bidang ekonomi dan industrialisasi (Winarso et al., 2014).

Selain itu, transformasi sosial ini juga didukung oleh berbagai kebijakan lain, seperti penghapusan sistem kewajiban tenaga kerja paksa, pemberian hak yang lebih besar kepada perempuan dalam pendidikan, dan pengurangan pengaruh kelas sosial tradisional dalam pemerintahan dan bisnis. Di sisi lain, media seperti surat kabar, buku, dan majalah juga diproduksi besar-besaran sehingga memberikan akses informasi kepada masyarakat umum (Jansen, 2002). Media ini menyebarkan ide-ide modernisasi, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, dan kebanggaan terhadap budaya Jepang.

Kedua, reformasi politik yang menyokong sentralisasi kekuasaan. Selain transformasi sosial, Restorasi Meiji juga membawa perubahan besar dalam sistem politik Jepang. Pemerintahan yang ada tidak hanya diserahkan kepada kaisar, tetapi juga diberlakukan sistem baru. Pada tahun 1889, Konstitusi Meiji diperkenalkan sebagai dasar sistem pemerintahan modern yang terinspirasi dari model Barat. Sistem ini memperkenalkan pembentukan parlemen (Diet) dan prinsip-prinsip pemerintahan seperti supremasi hukum dan pemisahan kekuasaan (Jansen, 2002). Walaupun sistem ini memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, Kaisar tetap diposisikan sebagai simbol persatuan nasional, memastikan kontinuitas nilai tradisional di tengah modernisasi (Masumi, 2023).

Diet Jepang, yang dibentuk pada tahun 1890 sebagai lembaga legislatif dua kamar melalui Konstitusi Meiji, memiliki peran strategis dalam berbagai upaya, termasuk dalam mendukung revitalisasi budaya dan rekonstruksi identitas nasional. Dengan berfungsi sebagai forum legislasi dan wadah pembangunan nasional, Diet menjadi penghubung antara tradisi dan inovasi, menciptakan kebijakan yang mendorong modernisasi melalui pendidikan dan administrasi terpusat, juga melestarikan seni dan nilai budaya tradisional Jepang (Masumi, 2023). Stabilitas politik yang dijaga melalui legislasi harmonis memungkinkan pemerintah mengintegrasikan nilai-nilai seperti kesetiaan dan harmoni ke dalam masyarakat modern, sehingga memperkuat identitas nasional di tengah arus perubahan.

Sementara sentralisasi kekuasaan yang dilakukan pemerintah Meiji semakin memperkuat efektivitas penerapan kebijakan modernisasi di seluruh negeri. Infrastruktur seperti jalur kereta api, pelabuhan, dan sistem telegraf dibangun untuk mempercepat mobilitas dan komunikasi, sedangkan reformasi hukum dan militer mengadopsi model Prusia (sekarang Jerman) dan Prancis untuk menciptakan sistem yang efisien dan tangguh (Masumi, 2023).

Langkah-langkah ini memperkuat posisi Jepang sebagai kekuatan modern, juga menanamkan rasa kebanggaan dan persatuan di antara rakyatnya, mempertegas keberhasilan Jepang dalam menyelaraskan tradisi dan inovasi.

Ketiga, diplomasi kebudayaan. Sebagaimana telah diketahui bersama, salah satu hal yang membedakan Jepang dari negara-negara lain yang mengalami modernisasi adalah kemampuannya untuk mempertahankan dan bahkan memperkuat nilai-nilai tradisional di tengah perubahan besar. Restorasi Meiji bukan hanya tentang adopsi teknologi dan sistem Barat, tetapi juga tentang menjaga warisan budaya yang menjadi inti dari identitas nasional Jepang. Tradisi seperti *Bushido*—kode etik samurai yang menekankan disiplin, kerja keras, dan kesetiaan—diintegrasikan ke dalam etos masyarakat modern. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga diterapkan dalam berbagai sektor meliputi dunia bisnis, pendidikan, dan pemerintahan sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan (Danurtia & Setiawan, 2023).

Salah satu dokumen krusial yang mendukung integrasi nilai-nilai tradisional dalam masyarakat modern Jepang adalah dekrit pendidikan *Kyoiku Chokugo* (教育勅語), yang dikeluarkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890 (Odaka, 2002). Dekrit ini menekankan peran negara, dan lebih khusus lagi, peran Kaisar, dalam membentuk moralitas dan etika rakyat melalui pendidikan. *Kyoiku Chokugo* menegaskan pentingnya kebajikan pribadi, kesetiaan kepada negara, dan tanggung jawab sosial yang menjadi landasan bagi pembentukan masyarakat yang harmonis dan produktif. Melalui ajaran ini, nilai-nilai seperti *Bushido* dan lainnya diteruskan secara sistematis dalam pendidikan, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas negara dan identitas nasional di tengah perubahan besar yang dibawa oleh modernisasi. Oleh karena itu, *Kyoiku Chokugo* juga fondasi yang menghubungkan antara tradisi dan modernitas.

Dalam konteks ini, Pemerintah Meiji mengambil langkah konkret untuk memastikan pelestarian seni dan budaya tradisional Jepang di tengah modernisasi. Salah satu langkah strategisnya adalah mendirikan lembaga-lembaga kebudayaan yang bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya tradisional. Misalnya, lembaga seni Kabuki didukung secara finansial dan administratif oleh pemerintah. Demikian pula, upacara minum teh (*chanoyu*) dan kaligrafi Jepang (*shodo*) difasilitasi dalam berbagai institusi pendidikan dan acara-acara publik. Pemerintah Meiji juga melibatkan seniman dan budayawan dalam menciptakan perpaduan antara nilai tradisional dan inovasi modern, menghasilkan karya-karya seni yang melestarikan tradisi dan relevan dengan perubahan zaman (Starrs, 2011).

Lebih lanjut, dalam konteks modernisasi, Jepang tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya di dalam negeri tetapi juga mulai memanfaatkan budayanya sebagai alat diplomasi internasional. Pada akhir abad ke-19, Jepang aktif berpartisipasi dalam pameran internasional, seperti Pameran Dunia di Paris (1867) dan Chicago (1893), di mana seni cetak kayu *ukiyo-e* dan kerajinan tangan Jepang diperkenalkan kepada audiens global (Starrs, 2011). Langkah ini meningkatkan citra Jepang di mata dunia, dan memperluas pasar untuk produk budaya tradisional mereka. Upaya diplomasi budaya ini menjadi cikal bakal strategi *soft power* Jepang yang lebih terstruktur di kemudian hari.

Di dalam negeri, pemerintah mendukung publikasi dan dokumentasi budaya tradisional untuk memastikan nilai-nilai ini diwariskan ke generasi mendatang. Buku-buku tentang seni dan tradisi Jepang diterbitkan secara luas, dan media massa seperti surat kabar digunakan untuk mempromosikan pentingnya menghormati tradisi sebagai bagian dari identitas nasional. Selain itu, seni seperti Kabuki mulai dimodifikasi dengan elemen-elemen modern seperti pencahayaan

dan panggung bergerak, membuatnya lebih menarik bagi audiens urban yang mulai terbiasa dengan gaya hidup modern (Sudarsih, 2017).

Memasuki abad ke-21, warisan kebijakan budaya era Meiji berkembang menjadi alat *soft power* yang sangat efektif. Pemerintah Jepang, melalui lembaga kebudayaan seperti *Japan Foundation*, secara aktif mendukung penyebaran budaya modern Jepang ke seluruh dunia. Produk budaya seperti *anime*, *manga*, dan seni kuliner seperti *sushi*, yang berakar pada nilai-nilai tradisional tetapi dikemas dengan inovasi modern, menjadi alat diplomasi budaya yang sangat kuat (Khasanah et al., 2023). Melalui *anime* dan *manga*, falsafah dan kebudayaan Jepang dalam berbagai aspek terpromosikan secara efektif dan masif, sehingga menimbulkan tren komunitas global seperti *wibu* dan *otaku* (Lacuesta & Fallon, 2020). Selain itu, inisiatif seperti “*Cool Japan*” juga memanfaatkan warisan ini untuk memperkuat daya tarik budaya Jepang di mata dunia, menciptakan penggemar global yang tidak hanya mengapresiasi produk budayanya, tetapi juga tertarik pada filosofi dan nilai-nilai di baliknya (Tamaki, 2019).

Pada akhirnya, Restorasi Meiji adalah titik balik yang mengubah Jepang secara menyeluruh. Dalam momen dan kontemplasi yang panjang, negara ini berhasil bertransformasi dari sistem feodal yang terisolasi menjadi kekuatan modern dengan identitas budaya yang kokoh. Transformasi ini mencakup banyak aspek dan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya untuk maju, berjuang bersama, dengan semangat *samurai*. Sementara masyarakat memahami dan bersedia, bekerja sama membangun bangsa dan mengembalikan marwah Jepang utamanya di mata dunia. Hingga kini, warisan Restorasi Meiji tetap terasa dari sektor pendidikan hingga diplomasi budaya. Restorasi Meiji bukan hanya tentang modernisasi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah bangsa merekonstruksi identitasnya dan merevitalisasi tradisi kebudayaannya di tengah tantangan dunia yang terus berubah.

3.2 Identitas Indonesia dan Dinamikanya di Era Globalisasi

Indonesia, sebagai sebuah negara yang kaya akan keberagaman budaya, menghadapi tantangan besar di era globalisasi. Perjalanan sejarah panjang bangsa ini membuktikan bahwa budaya merupakan salah satu elemen paling penting dalam membangun identitas nasional. Sejak masa kerajaan hingga era kolonial, budaya Indonesia telah mengalami proses pembentukan, akulturasi, dan transformasi yang tiada henti (Widyosiswoyo, 2006). Namun, globalisasi membawa dinamika baru yang sangat kompleks, di mana batas-batas geografis dan kultural semakin kabur akibat arus informasi, teknologi, dan ekonomi yang semakin terintegrasi. Dalam konteks ini, manusia Indonesia dihadapkan pada dilema besar: bagaimana menjaga identitas budaya yang kaya di tengah penetrasi budaya global, yang mendominasi hampir pada semua aspek kehidupan.

Sehubungan dengan itu, di tengah era globalisasi, tiga aspek krusial berhubungan dengan identitas keindonesiaan meliputi aspek sosial, politik, dan budaya itu sendiri. *Pertama*, dalam aspek sosial, manusia Indonesia mengalami pergeseran pola hidup yang signifikan. Urbanisasi yang cepat mendorong semakin banyak orang meninggalkan desa dan tradisi lokal mereka untuk hidup di kota-kota besar. Di kota, gaya hidup modern yang diwarnai oleh konsumerisme dan individualisme sering kali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional seperti gotong royong, kesederhanaan, dan kebersamaan. Perubahan ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara masyarakat berinteraksi dan memandang budaya mereka sendiri. Tradisi yang dahulu menjadi inti kehidupan sosial mulai tersisih oleh gaya hidup yang lebih praktis dan instan, terutama di kalangan generasi muda Indonesia (Bangu & Kasim, 2024).

Generasi muda Indonesia merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh globalisasi. Mereka hidup dalam dunia yang terkoneksi melalui teknologi digital dan media sosial, di mana budaya global dengan mudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Budaya populer seperti K-Pop, *anime*, dan gaya hidup Barat menjadi bagian dari identitas baru yang mereka adopsi. Ini terlihat dalam cara berpakaian, pilihan hiburan, hingga makanan yang mereka konsumsi. Banyak dari mereka yang lebih akrab dengan tren mode dan musik internasional daripada tradisi lokal seperti tarian daerah atau seni musik tradisional (Aris et al., 2023). Fenomena ini mencerminkan bagaimana budaya asing berhasil menanamkan pengaruhnya dengan sangat kuat, sering kali mengaburkan apa yang biasanya diidentifikasi sebagai kebudayaan Indonesia asli.

Di samping itu, media sosial, yang menjadi bagian integral dari kehidupan manusia Indonesia di era globalisasi, turut memperkuat penetrasi budaya global. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, selain menjadi sarana hiburan, juga tempat di mana nilai-nilai budaya global didistribusikan dan ditanamkan (Alamsyah, 2023). Di sisi lain, media sosial juga menunjukkan sisi lain dari manusia Indonesia. Netizen Indonesia dikenal sangat aktif di dunia maya, membentuk komunitas yang solid dalam mendukung atau menentang isu-isu tertentu. Mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang dunia maya, yang mana sering kali dengan pendekatan yang agresif dan emosional. Contohnya, ketika suatu peristiwa, produk, atau isu dianggap menyinggung identitas Indonesia, netizen Indonesia tidak segan-segan melancarkan serangan melalui tagar, komentar pedas, hujatan, dan bahkan tindak kriminal siber yang beraneka macam. Namun, solidaritas ini juga bisa berbalik menjadi kekuatan positif, seperti ketika mereka mengangkat figur atau mengawal isu tertentu yang dianggap urgen (Wijoyo, 2023). Hal ini menunjukkan dualitas perilaku netizen Indonesia yang solid tetapi cenderung “bar-bar” dalam mengekspresikan pendapat mereka. Dalam salah satu survei bahkan dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan netizen paling tidak sopan nomor satu di dunia (Wijoyo, 2023).

Di sisi lain, ironisnya, meskipun manusia Indonesia menunjukkan kebanggaan luar biasa terhadap kebudayaan mereka di jagat media, apalagi ketika diapresiasi oleh pihak luar; dalam realitasnya, mereka sendiri sering kali abai dalam upaya melestarikan budaya tersebut. Misalnya, kain batik mendapat perhatian global ketika dikenakan oleh tokoh internasional seperti Obama atau IShowSpeed. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, batik sering hanya dipakai pada acara formal atau tertentu saja (Pratamartatama et al., 2024). Lebih parah lagi, masyarakat cenderung reaktif ketika budaya seperti Reog Ponorogo atau tari Pendet diklaim oleh negara lain, tetapi di sisi lain tidak banyak upaya konkret yang terlihat untuk menjaga dan menghidupkan budaya tersebut di dalam kenyataannya (Aisara et al., 2020). Fenomena ini menunjukkan kontradiksi besar dalam cara masyarakat Indonesia memandang identitas budaya mereka, yakni: bangga secara simbolik tetapi kurang berkomitmen secara substansial.

Kemudian dalam hal pendidikan, satu elemen yang difokuskan oleh Jepang sekaligus yang seharusnya menjadi alat utama dalam pengendalian sosial untuk menjaga identitas nasional, di Indonesia keberadaannya sering kali gagal memainkan perannya secara maksimal. Kurikulum pendidikan nasional memang mencakup mata pelajaran seni budaya dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), tetapi pendekatannya sering kali bersifat formal dan teoritis. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya budaya dan nilai-nilai keindonesiaan, tetapi tanpa pelatihan dan pengalaman langsung yang bermakna, sehingga pembelajaran ini sering kali hanya berakhir pada hafalan (Yunhadi, 2019). Seni budaya, misalnya, diajarkan melalui teori tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk benar-benar terlibat dalam praktik seni tradisional (Hapsari et al., 2023). Akibatnya, banyak siswa yang tidak merasa terhubung

dengan warisan budaya mereka sendiri, utamanya yang biasa terjadi di sekolah-sekolah daerah yang masih kekurangan fasilitas yang hingga kini masih mayoritas.

Selain itu, fokus pendidikan pada aspek kognitif sering kali mengabaikan pengembangan karakter budaya. Anak-anak didorong untuk menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung sejak usia dini, tetapi nilai-nilai seperti gotong royong, kesederhanaan, dan cinta tanah air jarang menjadi prioritas dalam pendidikan dasar. Padahal, sebagaimana yang terjadi di Jepang, karakter budaya yang kuat hanya dapat terbentuk melalui praktik yang konsisten sejak usia dini. Di Jepang, anak-anak diajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan kebersihan melalui kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dalam sistem pendidikan mereka. Model ini menunjukkan bahwa pembentukan karakter tidak memerlukan banyak teori, melainkan latihan terus-menerus yang akhirnya membentuk kebiasaan; berbeda dengan yang ada di Indonesia (Halawa et al., 2023).

Kedua, dalam aspek politik. Semenjak memasuki era globalisasi, secara formal, Indonesia menganut sistem demokrasi presidensial, di mana presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Di tingkat kebijakan, pemerintahan Indonesia dengan lembaga legislatifnya telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pelestarian budaya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Akan tetapi, implementasi dari kebijakan konstitusional tersebut sering kali tidak berjalan dengan optimal (Wulandari, 2024). Program-program pelestarian budaya sering kali bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan. Sebagai contoh, Festival Budaya Nusantara dan Pekan Kebudayaan Nasional memang menjadi ajang untuk mempromosikan seni dan budaya lokal, tetapi dampaknya sering kali terbatas pada acara itu sendiri tanpa ada tindak lanjut yang signifikan. Padahal, negara-negara lain seperti Jepang menunjukkan bahwa pelestarian budaya membutuhkan strategi yang terintegrasi dan jangka panjang.

Dalam konteks internasional, diplomasi budaya Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Jepang, misalnya, berhasil memanfaatkan budaya modern mereka seperti *anime* dan *manga* untuk mempromosikan nilai-nilai dan produk tradisional Jepang ke seluruh dunia (Erwindo, 2018). Hal ini sebagaimana telah disinggung, bahwa dengan mode promosi yang demikian, Jepang berhasil menimbulkan gelombang komunitas subkultur global seperti *wibu*, *otaku*, dan *cosplayer*, termasuk di Indonesia (Pristianti, 2024). Dengan demikian, perpolitikan di Indonesia sampai sejauh ini masih menghadapi tantangan dalam upaya optimalisasi implementasi dari kebijakan yang telah dikeluarkan, dan pengambilan langkah-langkah lebih strategis terkait identitas kebudayaan.

Ketiga, dalam aspek budaya. Keanekaragaman budaya Indonesia di tengah era globalisasi masih menjadi sesuatu yang niscaya. Hanya saja, pada faktanya, keberagaman budaya yang seharusnya menjadi kekuatan besar sejauh ini sering kali terpinggirkan oleh arus globalisasi (Bangu & Kasim, 2024). Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah, ribuan tradisi seni, dan berbagai jenis kuliner khas yang diakui dunia, tetapi keberagaman ini belum sepenuhnya bermanfaat sebagai aset strategis. Seni tradisional seperti wayang kulit, Tari Saman, dan gamelan mulai kehilangan penggemarnya karena minimnya promosi yang relevan dengan perkembangan zaman (Saputro, 2020). Banyak komunitas seni tradisional yang berjuang sendiri untuk melestarikan warisan mereka tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah atau masyarakat luas (Hairudin, 2022). Hal ini menunjukkan Indonesia berada di ambang kritis dalam kehidupan yang berkebudayaan.

Adapun dalam analisis Widiastuti (2013), pada dasarnya keberagaman tersebut dapat menjadi magnet yang dapat mempersatukan bangsa dan menarik perhatian dunia. Namun, meskipun memiliki potensi besar, keanekaragaman ini belum memiliki strategi yang kuat untuk memperkenalkan budaya lokal di panggung global. Upaya seperti promosi batik dan kuliner

khas memang sudah dilakukan, tetapi skalanya masih terbatas dan belum mampu membangun citra budaya Indonesia yang konsisten di mata dunia (Nasution, 2018).

Di sisi lain, berdasarkan keterangan dari Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Indonesia, justru dikatakan bahwa keberagaman budaya ini justru merupakan tantangan. Tantangan di sini dalam arti menentukan mana yang representatif menunjukkan Keindonesiaan di tengah banyaknya varietas kebudayaan. Sebagai contoh, soto yang diklaim sebagai kuliner Indonesia seketika dipresentasikan dalam khalayak global membawa kebingungan mana yang harus dipilih. Mengingat, setidaknya ada 100 jenis soto di Indonesia dengan masing-masing karakteristik pembedanya (Farid, 2024).

Secara keseluruhan, karakteristik Indonesia dan dinamikanya di era globalisasi adalah sebuah potret yang penuh perubahan tanpa henti. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia. Namun, di sisi lain, arus globalisasi juga membawa tantangan besar dalam menjaga identitas budaya di tengah gempuran budaya asing. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dan pemerintah mampu bekerja sama untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen yang kuat, baik dari individu, komunitas, maupun negara. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan identitas budayanya di tengah dunia yang terus berubah.

3.3 Penerapan Pola Restorasi Meiji dalam Konteks Indonesia Terkait Rekonstruksi Identitas dan Revitalisasi Budaya

Sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang, dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia menghadapi dilema besar yang berakar pada kegamangan identitas budaya dan ketidakberdayaan dalam mempertahankan jati diri nasional. Globalisasi dalam hal ini bukan sekadar arus ekonomi dan teknologi; tetapi juga medium penetrasi budaya yang mengaburkan batas-batas identitas lokal. Dalam konteks ini, pengalaman Jepang melalui Restorasi Meiji dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Meskipun keadaan konkret sebagai titik berangkatnya mungkin berbeda, tetapi baik Jepang di abad ke-19 maupun Indonesia saat ini berada dalam kondisi genting yang serupa, yang mana mengharuskan rekonstruksi identitas dan revitalisasi budaya untuk menjaga eksistensi di tengah perubahan zaman.

Restorasi Meiji seperti yang telah diuraikan menandai transformasi besar dalam sejarah Jepang. Setelah ratusan tahun di bawah sistem feodal Keshogunan Tokugawa, Jepang menghadapi ancaman dari Barat yang tidak hanya membawa modernitas tetapi juga memaksa Jepang untuk berubah. Tekanan ini bersifat eksistensial, dengan ultimatum yang disertai kekuatan militer. Sebagai respons, Jepang memilih untuk menerima kenyataan bahwa Barat unggul dalam teknologi, sistem pemerintahan, dan militer, lalu mempelajarinya tanpa kehilangan keunikan budaya mereka. Mereka mengadopsi prinsip “*Wakon Yosai*”—semangat Jepang dengan pengetahuan Barat—yang memungkinkan mereka untuk menyelaraskan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan modernitas (Anita & Lado, 2024). Dalam hal ini, keberhasilan Jepang terletak pada keberanian mereka untuk menerima kenyataan, dan bertindak dengan visi jangka panjang.

Sementara Indonesia saat ini dapat dipahami menghadapi situasi yang berbeda, tetapi tantangannya memiliki kesamaan fundamental: tekanan global yang mengancam identitas budaya. Penetrasi budaya asing melalui media sosial, konsumsi produk global, dan gaya hidup modern telah menciptakan krisis identitas, terutama di kalangan generasi muda. Budaya populer seperti K-Pop, *anime*, dan tren Barat telah merasuk hingga ke relung kehidupan sehari-

hari, menggusur tradisi lokal yang kaya akan nilai-nilai luhur. Dalam konteks ini, penting untuk memahami konsep identitas nasional dari perspektif yang lebih dalam. Menurut filsuf seperti Ricoeur (1991), identitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sebuah narasi yang terus berkembang melalui interaksi antara tradisi dan perubahan. Maka identitas nasional, dalam pandangan ini, dapat dipahami bukan sekadar simbol eksternal seperti pakaian atau upacara, melainkan mentalitas, karakter, dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai esensial sebuah bangsa.

Dengan demikian, bagi Indonesia, identitas nasional tidak bisa sekadar diartikan melalui ornamen-ornamen budaya seperti batik, tari-tarian, atau bahasa daerah. Identitas nasional harus terwujud dalam karakter masyarakatnya yang menampilkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, kesederhanaan, dan toleransi. Hal ini serupa dengan Jepang, sebagaimana telah disinggung, di mana kejepangan mereka tetap dikenali meskipun tidak lagi memakai zirah samurai atau hidup di bawah struktur shogun. Kejepangan terletak pada etos kerja keras, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan yang mendalam (Jansen, 2002). Dengan kata lain, pertama-tama perlu dipahami bahwa identitas nasional adalah manifestasi dari mentalitas dan karakter yang menjadi jiwa bangsa, tidak terhenti pada tampilan dan wujud konkret luaran.

Sementara penerapan pola Restorasi Meiji dalam konteks Indonesia memerlukan pendekatan yang sistematis melalui tiga langkah utama: transformasi sosial, reformasi politik, dan diplomasi budaya. Ketiga langkah ini membutuhkan peran aktif dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah memiliki peran sentral sebagai fasilitator dan pembuat kebijakan strategis. Sedangkan masyarakat—baik secara individu maupun kelompok—harus menjadi penggerak utama perubahan. Dengan mengintegrasikan pengalaman Jepang selama Restorasi Meiji ke dalam konteks lokal, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat identitas budayanya di tengah tekanan globalisasi. Berikut uraian lebih lanjut.

Pertama, transformasi sosial menjadi fondasi utama dalam membangun kembali identitas budaya Indonesia. Selama Restorasi Meiji, Jepang menghapus sistem strata sosial yang melibatkan samurai—simbol kebanggaan Jepang—dan dengan semangat meritokrasi, menjadikan pendidikan sebagai pilar utama dalam proses transformasi sosial. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi modern, tetapi juga tetap bangga terhadap tradisi lokal. Upaya ini dimulai dengan penerapan sistem *Gakusei* pada tahun 1872, yang memperkenalkan pendidikan dasar wajib bagi seluruh rakyat Jepang untuk meningkatkan literasi, menanamkan nilai-nilai nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab sosial (Duke, 2009). Meskipun menghadapi berbagai penolakan karena dianggap terlalu mahal dan tidak sesuai dengan kondisi lokal, kebijakan ini disempurnakan melalui *Kyoikurei* tahun 1879 yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengelola pendidikan sesuai kebutuhan mereka, meskipun tetap di bawah pengawasan pusat (Rustam, 2003). Perubahan ini diikuti dengan penekanan pada pendidikan moral berbasis Konfusianisme, yang mengutamakan kesetiaan, keharmonisan, dan etos kerja sedari dini (Aso & Amano, 1972). Reformasi pendidikan ini kemudian diperkokoh dengan Dekrit Pendidikan *Kyoiku Chokugo* tahun 1890, yang menegaskan pentingnya loyalitas kepada negara dan Kaisar serta mengajarkan etos kerja keras kepada setiap individu (Odaka, 2002). Dengan pendekatan yang praktis melalui sistem ini, Jepang pada akhirnya berhasil membangun generasi yang siap menghadapi modernitas dan mempertahankan identitas budayanya yang berakar kuat dalam karakter dan tradisi masing-masing pribadi.

Di Indonesia, jika ingin menghasilkan produk yang serupa, pendekatan serupa juga harus diterapkan. Pendidikan harus dijadikan alat utama untuk membentuk mentalitas dan karakter nasional yang kuat, sebagaimana Jepang yang menggunakannya untuk menciptakan

generasi yang adaptif tetapi tetap berakar pada nilai-nilai budayanya sendiri. Pendidikan tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai keindonesiaan sejak usia dini. Anak-anak perlu dilibatkan dalam praktik-praktik yang memperkuat karakter, seperti gotong royong, cinta tanah air, dan penghormatan terhadap tradisi. Fokus pendidikan dasar tidak perlu dibebani dengan target akademik yang tinggi, seperti kemampuan membaca atau matematika yang terlalu dini. Sebaliknya, pendidikan dasar harus difokuskan pada pembentukan karakter dan kebiasaan yang mencerminkan nilai-nilai nasional. Dengan demikian, generasi penerus bangsa akan memiliki mentalitas yang kuat dan independen, seperti halnya generasi muda Jepang yang tidak mudah tergerus oleh budaya asing.

Kedua, reformasi politik. Betapa pun secara sistem formal Indonesia telah menganut model yang hampir serupa, reformasi ini tetap diperlukan untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung pelestarian budaya. Pemerintah Indonesia dapat belajar dari pengalaman Jepang selama Restorasi Meiji, di mana pembentukan lembaga khusus untuk melestarikan budaya menjadi salah satu langkah strategis (Teranishi, 2020). Salah satu contoh konkret dari upaya ini adalah pendirian *Tokyo School of Fine Arts (Tokyo Bijutsu Gakko)* pada tahun 1888 oleh pemerintah Meiji. Lembaga ini berperan dalam menyediakan pendidikan seni yang dikelola negara, dengan fokus awal pada pelestarian dan pengembangan seni lukis tradisional Jepang, Nihonga (Kaoru, 2023).

Indonesia membutuhkan lembaga yang berfungsi serupa, memiliki otoritas untuk memberikan perlindungan, insentif, dan kesejahteraan bagi seniman, budayawan, serta pelaku budaya lainnya. Lembaga ini harus berfungsi sebagai pengelola kegiatan budaya, dan sebagai penghubung antara seni tradisional dengan peluang modernisasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Stereotip negatif yang meremehkan profesi seperti seniman dan penyair harus dihilangkan (Munawwar et al., 2023). Pemerintah harus memastikan bahwa profesi ini mendapatkan pengakuan dan dukungan yang layak, baik dalam bentuk penghargaan maupun insentif ekonomi. Dengan demikian, para pelaku budaya dapat berkarya dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, tanpa khawatir tentang kesejahteraan mereka.

Di samping itu, reformasi politik berdasarkan pola restorasi Meiji juga harus mencakup penguatan strategi diplomasi budaya sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri. Pemerintah perlu memastikan bahwa budaya Indonesia diintegrasikan ke dalam narasi diplomasi global untuk memperkuat citra negara di mata dunia. Contohnya, promosi budaya lokal seperti batik, gamelan, dan kuliner tradisional harus didorong melalui inisiatif yang lebih terstruktur. Pendekatan ini tentu akan meningkatkan apresiasi global terhadap budaya Indonesia, juga menciptakan dampak ekonomi yang signifikan melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketiga, diplomasi budaya. Langkah ini menjadi langkah yang menyempurnakan upaya rekonstruksi identitas dan revitalisasi budaya Indonesia, sebagaimana Jepang di era Restorasi Meiji. Seiring dengan modernisasi yang pesat, pemerintah Meiji menyadari bahwa pelestarian dan promosi budaya tradisional harus dilakukan agar identitas nasional tetap terjaga di tengah pengaruh global. Oleh karena itu, berbagai kebijakan budaya diterapkan sebagai bagian dari strategi diplomasi untuk memperkenalkan Jepang kepada dunia tanpa kehilangan akar tradisinya. Salah satu langkah konkret dalam upaya ini adalah partisipasi Jepang dalam pameran internasional, seperti *Exposition Universelle Paris 1867* dan *Weltausstellung 1873* di Wina, di mana seni dan kerajinan tradisional Jepang dipamerkan sebagai bagian dari citra nasional yang ingin dibangun (Starrs, 2011). Pemerintah Meiji juga mengirimkan seniman dan intelektual Jepang ke luar negeri untuk mempelajari perkembangan seni Barat, tetapi dengan tetap mempertahankan ciri khas Jepang dalam karya-karya mereka.

Selain itu, pelestarian seni tradisional juga mendapat perhatian khusus dalam kebijakan budaya era Meiji. Pemerintah mendukung perkembangan seni lukis Nihonga sebagai bentuk seni lukis Jepang yang tetap mempertahankan teknik tradisional, meskipun berkembang dalam konteks modern. Institusi seperti *Tokyo School of Fine Arts* (1888) didirikan untuk membina seniman dalam menciptakan karya seni yang mencerminkan identitas budaya Jepang di tengah modernisasi (Kaoru, 2023). Tidak hanya seni rupa, bentuk kesenian lain seperti Kabuki dan Noh juga mengalami revitalisasi agar tetap relevan dengan audiens modern, tetapi tanpa kehilangan nilai-nilai estetikanya (Sudarsih, 2017).

Strategi budaya yang dirancang pada era Meiji ini kemudian berkembang menjadi diplomasi budaya Jepang yang lebih luas di abad ke-20 dan ke-21. Dengan fondasi kuat yang telah diletakkan sejak era Meiji, Jepang mampu mengemas nilai-nilai tradisionalnya dalam bentuk yang lebih modern. Produk-produk budaya seperti *anime*, *manga*, dan film Jepang yang saat ini menjadi alat diplomasi budaya global dapat dipahami sebagai kelanjutan dari upaya membangun identitas budaya yang telah dimulai sejak Restorasi Meiji (Teranishi, 2020). Produk-produk ini berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan falsafah hidup Jepang kepada dunia, alih-alih sebagai hiburan semata. Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini dengan mengemas seni dan budaya tradisional ke dalam format yang relevan dengan zaman. Misalnya, wayang kulit dapat dipadukan dengan teknologi digital untuk menciptakan pengalaman interaktif yang menarik bagi generasi muda. Musik gamelan dapat diintegrasikan ke dalam komposisi musik modern untuk menciptakan daya tarik lintas generasi. Pendekatan ini memungkinkan budaya tradisional tetap hidup dan relevan tanpa kehilangan esensinya. Adapun mungkin sudah, hal tersebut mesti terus disemarakkan seluas dan semasif mungkin.

Sehubungan dengan itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam diplomasi budaya ini. Netizen Indonesia, yang dikenal aktif di media sosial, dapat menjadi agen promosi budaya lokal. Solidaritas yang sering digunakan untuk isu-isu kontroversial dapat dialihkan untuk mendukung produk budaya Indonesia. Kampanye digital untuk mempromosikan batik, kuliner lokal, atau seni tradisional dapat menciptakan gelombang apresiasi yang meningkatkan kesadaran budaya, juga mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan budaya, baik secara luring maupun daring, akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga relevansi budaya tradisional di era globalisasi.

Revitalisasi budaya Indonesia memerlukan kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas budaya, dan sektor swasta dengan mengacu pada pola Restorasi Meiji. Upaya kolaboratif ini penting untuk memastikan keberlanjutan program-program pelestarian budaya. Festival budaya seperti *Festival Harmoni Budaya Nusantara* atau *Pekan Kebudayaan Nasional* perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan dampak yang lebih signifikan. Selain itu, sektor swasta perlu berperan aktif dalam berkolaborasi dengan komunitas budaya untuk mengembangkan produk inovatif yang menggabungkan elemen tradisional dan modern.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan yang dikemukakan oleh Rustamana et al. (2023) dan Anita & Lado (2024) bahwa keberhasilan Jepang dalam Restorasi Meiji dipengaruhi oleh kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan modernisasi melalui konsep *Wakon Yosai*. Penelitian ini juga menawarkan pandangan baru bahwa strategi tersebut dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi yang berdampak pada identitas budaya sebagaimana diungkapkan oleh Pangesti et al. (2024) dan Mutmainah & Dewi (2021). Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan menyoroti akar strategi budaya Jepang sejak era Meiji yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dengan perspektif ini, penelitian ini mengusulkan pola

rekonstruksi identitas Jepang sebagai model yang dapat diterapkan di Indonesia untuk menguatkan identitas budaya nasional yang dinamis dan relevan di tengah arus global.

Pada akhirnya, penerapan pola Restorasi Meiji dalam konteks Indonesia harus dimulai dengan perubahan paradigma. Bangsa Indonesia harus berani menerima kenyataan bahwa globalisasi membawa tantangan besar, tetapi juga peluang yang luar biasa. Seorang pribadi bangsa harus berhenti bersikap naif atau defensif terhadap budaya asing, tetapi juga tidak kehilangan kepercayaan diri terhadap nilai-nilai lokal. Sebagaimana Jepang berhasil menciptakan identitas modern yang tetap berakar pada tradisi, Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama. Identitas nasional bukan tentang mempertahankan semua elemen masa lalu, tetapi tentang menciptakan narasi baru yang relevan dengan zaman tanpa kehilangan esensi. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan komunitas budaya, Indonesia dapat membangun identitas budaya yang adaptif, kuat, dan berdaya saing di era globalisasi.

4. Kesimpulan

Restorasi Meiji menunjukkan bagaimana Jepang berhasil merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budaya melalui perpaduan nilai tradisional dan inovasi modern. Transformasi sosial, reformasi politik, dan peran strategis pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan identitas nasional yang kokoh dan relevan di tengah tekanan global. Dalam konteks Indonesia, pola serupa dapat diterapkan mengingat tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda, yakni: kegamangan identitas budaya akibat arus globalisasi dan ketergantungan pada pihak asing. Untuk merekonstruksi identitas dan merevitalisasi budaya Indonesia, diperlukan reformasi pendidikan berbasis nilai keindonesiaan, strategi pelestarian budaya yang adaptif, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan dan upaya pemeliharaan yang berkelanjutan.

Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut yang lebih mendalam dan aplikatif terkait revitalisasi budaya Indonesia. Penelitian ke depan dapat difokuskan pada eksplorasi model pendidikan berbasis karakter untuk membangun identitas budaya generasi muda, strategi konkret dalam memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya nasional, serta integrasi nilai tradisional ke dalam sektor ekonomi kreatif. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis data, penelitian mendatang dapat memberikan panduan praktis yang lebih terarah bagi pemerintah, akademisi, dan komunitas budaya, untuk menjaga dan memperkuat identitas Indonesia di tengah dinamika dunia yang senantiasa berubah.

Referensi

- Aisara, F., Nursaptini, & Widodo, A. (2020). Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar. *Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 149–166.
- Alam, W. M., Sandung, C. L., Octamaya, A., & Awaru, T. (2023). The Influence of the Korean Wave on the Dynamics of Multiculturalism Among Indonesia's Young Generation. *Journal of Indonesian Culture and Beliefs (JICB)*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55927/jicb.v2i1.4431>
- Alamsyah, A. (2023). Tirani Kebahagiaan dan Media Sosial: Sebuah Kajian Media dan Politik. *Jurnal Politik Profetik*, 11(1), 87–110. <https://doi.org/10.24252/profetik.v11i1.a6>

- Anita, & Lado, S. H. J. T. (2024). Historical Studies of Japan During the Meiji Restoration. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 8(1), 827–834. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.3745>
- Aris, N., Setyaningrum, D., Aslam, M., Putri, S., Wulan, T., Nugraha, D. M., & Fu'adin, A. (2023). Pengaruh Budaya Asing Terhadap Kesadaran Kalangan Muda. *Jurnal Pelta Kota*, 4(2), 419–429. <https://ejurnal.universitaskarimun.ac.id/index.php/pelita/>
- Aso, M., & Amano, I. (1972). *Education and Japan's Modernization*. Ministry of Foreign Affairs.
- Bakker, A., & Zubair, A. C. (2020). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius.
- Bangu, B. Y., & Kasim, A. M. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Identitas Budaya Lokal. *Fusion: A Multidisciplinary Journal*, 1(2), 7–12.
- Danurtia, S., & Setiawan, A. (2023). Pengaruh Diplomasi Budaya Jepang di Indonesia Melalui Japan Cultural Weeks 2021. *JSL Jurnal Socia Logica*, 3(2), 2023.
- Duke, B. C. (2009). *The History of Modern Japanese Education: Constructing the National School System 1872-1890*. Rutgers University Press.
- Farid, H. (2024). *Salah Kaprah Memahami Kebudayaan! | Hilmar Farid*. Malaka Project. <https://www.youtube.com/watch?v=o1R1ONdEVK4>
- Hairudin, M. (2022). *Kehidupan Seniman Senirupa di Taman Budaya Pada Era Milenial Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga*. IAIN Pontianak.
- Halawa, D. P., Telaumbanua, M. S., & Buulolo, D. (2023). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *NDRUMI: Jurnal Pendidikan Dan Humaniora*, 6(1). <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/NDURMI>
- Hapsari, Y. D., Rahmawati, S. A., Sani, F. A., Baskoro, A. P., Lestari, R., & Nadia, S. (2023). Pengaruh Metode Pembelajaran Praktek dan Ceramah pada Pembelajaran Seni Kelas III SD 6 BulungKulon. *Jurnal Ilmiah Profesi Guru (JIPG)*, 4(2), 137–145. <https://doi.org/10.30738/jipg.vol4.no2.a15396>
- Hellyer, R., & Fuess, H. (2020). *The Meiji Restoration: Japan as a Global Nation* (R. Hellyer & H. Fuess, Eds.). Cambridge University Press.
- Jansen, M. B. (2002). *The Making of Modern Japan*. Harvard University Press.
- Kaoru, K. (2023). From the Edo Era to the Beginning of the 20th Century: The Artistic Education of Women Painters. *Archives of Women Artists, Research and Exhibitions Magazine*.
- Khasanah, U., Naim, S., Priyanto, Kanah, & Dyah, W. (2023). Japanese Diplomatic Strategy in Using Traditional Culinary as An Instrument of Cultural Diplomacy in Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).

- Lacuesta, J., & Fallon, K. (2020). The Weeaboo Subculture: Identification and Performance. *Tourism Research*, 11(3), 343–352.
- Masumi, J. (2023). *Contemporary Politics in Japan*. University of California Press.
- Munawwar, A. F., Abidin, Z., & Utamidewi, W. (2023). Kontruksi Makna Mural Bagi Seniman Mural di Kota Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 9(25), 38–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408379>
- Mutmainah, S. U., & Dewi, D. A. (2021). Reaktualisasi Nilai Pancasila dan Implementasinya Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *EDUKATIF JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 3(2), 611–618. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.396>
- Nasution, D. Z. (2018). Citra Destinasi Melalui Film (Studi Kasus Kampung Wisata Batik Kauman Pekalongan). *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 23(1).
- Odaka, K. (2002). *The Evolution of Social Policy in Japan*. World Bank Institute.
- Pangesti, M., Khaeriah, A. S., Purwanto, E., Dwi, A., Nur, A., Syafitri, A., Shiva, M., Permata, A., Intan, N., & Azhari, H. (2024). The influence of social media on the cultural identity of the millennial generation: Indonesian case study. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 2(1), 7. <https://doi.org/10.47134/pssh.v2i1.241>
- Pratamartatama, W. A., Fredline, R. A., & Djunaidi, M. L. P. (2024). Pengaruh Budaya Asing Terhadap Trend Fashion Mahasiswa Maranatha. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(2), 1178–1189. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Pristianti, K. (2024). PENGARUH MENONTON ANIMASI JEPANG DI INTERNET TERHADAP GAYA HIDUP WIBU DI YOGYAKARTA. *Commsphere Jurnal Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 2(I), 93–121. <https://doi.org/10.37631/commsphere.v2ii.1353>
- Ricoeur, P. (1991). Narrative Identity. *Philosophy Today*, 35(1).
- Rustam, F. (2003). REFORMASI PENDIDIKAN PADA MASA JEPANG MEIJI: STUDI TENTANG PERAN POLITIK KEKUASAAN DALAM PENERAPAN PENDIDIKAN. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 7(2), 45. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.50>
- Rustamana, A., Alyani, L. I., Nurcahyo, G., Ardiansyah, F., & Pratiwi, A. (2023). Masa Restorasi Meiji Dampaknya Pada Perkembangan Jepang Modern dan Pengaruh Restorasi Meiji Terhadap China dan Korea. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 1(11), 101–112.
- Saputro, T. W. (2020). *Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Wayang Kulit Ramayana Dengan Metode Augmented Reality Berbasis Mobile Untuk Siswa SD*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Starrs, R. (2011). *Modernism and Japanese Culture*. Palgrave Macmillan.
- Sudarsih, S. (2017). Nilai-Nilai Dalam Kabuki di Jepang. *KIRYOKU*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.14710/kiryoku.v1i2.1-8>

- Tamaki, T. (2019). Repackaging national identity: Cool Japan and the resilience of Japanese identity narratives. *Asian Journal of Political Science*, 27(1), 108–126.
- Teranishi, J. (2020). *Studies in Economic History Culture and Institutions in the Economic Growth of Japan*. Springer. <http://www.springer.com/series/13279>
- Widiastuti. (2013). Analisis SWOT Keragaman Budaya Indonesia. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 8–14.
- Widyosiswoyo, S. (2006). *Sejarah Kebudayaan Indonesia*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Wijoyo, N. D. O. (2023). Analisis Media Sosial Mengenai Isu Indonesia Sebagai Negara Paling Tidak Sopan di Asia Tenggara. *Jurnal Riset Manajemen Komunikasi*, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.29313/jrmk.v3i1.1015>
- Winarso, H., Imamuddin, B., Noor, R. R., Wibisono, B. H., Anwar, C., Nurwardani, P., Kuswadi, S., Soelaiman, F., Djawad, M. I., Rubiyanto, A., Rusdi, Lukman, F., Widjajanto, D. W., Akhlus, S., Ismunandar, & Yunardi. (2014). *Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara*. Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <http://www.wikimedia.org>
- Wulandari, D. (2024). Implementasi Program Pemajuan Kebudayaan Desa: Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat berbasis Budaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 20–34. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4489>
- Yunhadi, W. (2019). Pengajaran Nilai Moral dalam Perspektif PPKN. *EDUCASIA Jurnal Pendidikan Pengajaran Dan Pembelajaran*, 4(2), 105–115. <https://doi.org/10.21462/educasia.v4i2.48>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.